

KORELASI PELAPORAN ESG DAN TRANSPARANSI AKUNTANSI PERPAJAKAN: STUDI KASUS PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA

Arip Sopiannudin¹, Amir Indrabudiman²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan, Indonesia

¹roy99161022@gmail.com

<p style="text-align: center;">Abstrak:</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri keterkaitan antara pengungkapan <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG) dan transparansi akuntansi perpajakan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan sintesis literatur dari 20 dokumen jurnal nasional dan internasional yang relevan, artikel ini menganalisis kontribusi ESG dalam membentuk sistem pelaporan yang akuntabel dan berdampak terhadap perilaku penghindaran pajak. Dalam kerangka <i>agency theory</i>, <i>stakeholder theory</i>, dan <i>legitimacy theory</i>, studi ini membuktikan bahwa pengungkapan ESG yang berkualitas tidak hanya menjadi instrumen keberlanjutan, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan, mengurangi risiko <i>greenwashing</i>, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan. Temuan ini menegaskan pentingnya keterlibatan akuntan profesional dan struktur tata kelola yang inklusif dalam mendorong pelaporan ESG yang efektif dan berintegritas, khususnya pada sektor manufaktur.</p> <p>Kata Kunci: ESG, Transparansi Pajak, Akuntansi, Penghindaran Pajak, Perusahaan Manufaktur</p>	<p>Article history Received: July 2025 Reviewed: July 2025 Published: July 2025</p> <p>Plagirism checker no 80 Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365</p> <p>Copyright : author Publish by : musytari</p>  <p>This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license</p>
---	--

PENDAHULUAN

Di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap keberlanjutan dan tata kelola yang bertanggung jawab, perusahaan dituntut tidak hanya menunjukkan kinerja finansial yang solid, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam operasional mereka. Konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah menjadi kerangka utama dalam menilai tanggung jawab perusahaan secara holistik. ESG bukan hanya tren, tetapi telah menjadi pilar penting dalam menjaga keberlanjutan usaha jangka panjang dan membangun reputasi yang kredibel di mata investor, konsumen, serta otoritas fiskal.

Di Indonesia, urgensi penerapan ESG diperkuat dengan lahirnya regulasi seperti POJK No. 51 Tahun 2017 yang mewajibkan penyampaian laporan keberlanjutan bagi perusahaan publik. Meskipun demikian, tingkat adopsi ESG reporting di Indonesia masih tergolong rendah. Data OJK menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% perusahaan publik yang secara konsisten menerapkan laporan ESG sesuai standar internasional seperti GRI atau SASB.² Salah satu tantangan besar adalah fenomena *greenwashing*, di mana perusahaan menyampaikan informasi keberlanjutan yang tidak akurat atau manipulatif, dengan tujuan mencitrakan diri lebih ramah lingkungan atau sosial daripada kenyataannya.

Peran akuntan dalam konteks ini menjadi sangat vital. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penyusun laporan, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan keandalan informasi yang disampaikan. Etika profesi akuntan, sebagaimana diuraikan oleh Setyaningrum dan Hasanah

(2025), menjadi fondasi moral yang mengarahkan pelaporan ESG agar tidak sekadar menjadi formalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban yang sah.² Ketika pelaporan ESG dijalankan dengan prinsip integritas, objektivitas, dan profesionalisme tinggi, maka laporan tersebut dapat meminimalkan konflik agensi dan menurunkan risiko penghindaran pajak oleh perusahaan.²

Berbagai studi menunjukkan bahwa ESG memiliki korelasi dengan kepatuhan fiskal perusahaan. Krisna (2024) menemukan bahwa semakin tinggi skor ESG perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan mereka melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh komitmen etis perusahaan terhadap tanggung jawab sosial yang menjadikan kepatuhan pajak sebagai bagian dari integritas bisnis mereka³. Di sisi lain, Al Hashfi (2024) menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan yang baik memperkuat efisiensi manajerial, strategi fiskal, dan mitigasi risiko perusahaan *distressed*.⁴

Namun demikian, literasi ESG di kalangan profesional akuntansi Indonesia masih relatif rendah. Kurangnya kompetensi teknis serta minimnya pelatihan dan integrasi etika profesi dalam kurikulum pendidikan akuntansi menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan regulator dalam memperkuat kapasitas akuntan di bidang ESG reporting, termasuk penerapan assurance independen sebagai mekanisme verifikasi objektif⁵.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara pelaporan ESG dan transparansi akuntansi perpajakan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Dengan merujuk pada pendekatan teoritis seperti *agency theory*, *stakeholder theory*, dan *legitimacy theory*, studi ini ingin menjawab bagaimana pengungkapan ESG yang kredibel mampu memengaruhi perilaku fiskal perusahaan, serta bagaimana akuntansi berperan dalam menjaga keadilan informasi demi meningkatkan kepatuhan pajak dan menghindari praktik manipulatif yang merugikan pemangku kepentingan.⁶

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah mengalami perkembangan pesat sebagai tolok ukur dalam menilai keberlanjutan perusahaan, dan semakin diintegrasikan ke dalam sistem pelaporan akuntansi modern. Dalam konteks perpajakan, ESG memainkan peran sentral dalam mendorong transparansi dan mengurangi praktik penghindaran pajak yang tidak etis. Penelitian oleh Reza Fathurrahman (2024) mengungkapkan bahwa perusahaan yang menerapkan ESG disclosure dengan baik menunjukkan kecenderungan lebih rendah dalam melakukan *tax avoidance*.⁷ Hal ini diperkuat oleh temuan Khikmatul Khusna (2025) dan Risma Tesya Andita (2024), yang membuktikan bahwa ESG dapat mereduksi asimetri informasi antara manajemen dan investor, yang sering dimanfaatkan untuk manipulasi laporan pajak.⁸

Tata kelola perusahaan yang kuat, sebagaimana diuraikan oleh Gabriel Silalahi (2024) dan Imam Prayoga (2024), juga memiliki kontribusi terhadap efektivitas pelaporan ESG dan keterbukaan fiskal. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dan peran aktif dewan komisaris dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan.⁹ Selain itu, keterlibatan profesional akuntan menjadi krusial. Novi Tri Setyaningrum dan Uswatun Hasanah (2025) menunjukkan bahwa etika profesi akuntan memiliki fungsi strategis dalam memastikan bahwa pelaporan ESG tidak terjerumus ke dalam praktik *greenwashing*. Hal ini relevan mengingat audit ESG independen, sebagaimana dianjurkan oleh Graciella Tanaya (2024), terbukti meningkatkan kredibilitas pelaporan dan kepercayaan publik.¹⁰

Penelitian Agustini (2023) menyatakan bahwa integrasi ESG dalam perusahaan manufaktur mampu meningkatkan reputasi dan memperkuat hubungan antara kinerja keberlanjutan dan nilai perusahaan secara menyeluruh. Hasil temuannya mendukung argumen bahwa ESG tidak hanya berdampak pada persepsi eksternal seperti investor dan konsumen, tetapi juga memengaruhi kebijakan internal seperti kepatuhan fiskal dan pelaporan akuntansi¹⁰. Sementara itu, Saproni (2024) menekankan pentingnya implementasi ESG dalam kerangka pelaporan yang akuntabel, terutama untuk menekan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan realisasi pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman bahwa keberhasilan ESG bergantung pada kolaborasi multidisipliner antara unit keuangan, hukum, dan audit internal.

Namun, efektivitas pelaporan ESG tidak hanya ditentukan oleh struktur formal perusahaan, tetapi juga oleh kualitas dan integritas individu penyusunnya. Dian Indriana Hapsari (2024) menekankan bahwa pengembangan sistem pelaporan keberlanjutan yang kuat harus disertai dengan penyusunan standar yang konsisten dan dapat diaudit secara obyektif.¹² Andi Indrawati (2024) dalam studi serupa menunjukkan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan ESG ke dalam proses penyusunan laporan keuangan dan perpajakan menunjukkan peningkatan integritas informasi fiskal yang dilaporkan.¹³

Dari aspek sosial, keberagaman gender dan inklusi dalam struktur dewan direksi memiliki implikasi positif terhadap kualitas pelaporan ESG. Studi oleh Ika Puspita Kristianti (2022) dan Zhafirrah Rosalinda (2025) menunjukkan bahwa representasi perempuan di dewan memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola yang inklusif, meningkatkan sensitivitas terhadap isu lingkungan dan sosial, serta memperkuat kepatuhan terhadap pajak¹⁴. Hal ini relevan dengan temuan Putri Vraza Ayunda Krisna (2024), yang menyoroti pentingnya komunikasi strategis berbasis ESG dalam memperkuat hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan fiskal.

Lebih lanjut, Fany Yulinda (2024) menguraikan bahwa integrasi ESG dalam proses pengambilan keputusan manajerial memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional dan kepatuhan fiskal perusahaan. Imam Prayogo (2024) menambahkan bahwa insentif yang selaras dengan nilai ESG dapat mencegah orientasi jangka pendek manajer dan memperkuat tanggung jawab pajak.¹⁵ Temuan dari Iman Harymawan (2024) juga penting, karena menunjukkan bahwa ESG disclosure dapat menurunkan risiko finansial perusahaan yang berada dalam kondisi distress.¹⁶

Dari perspektif eksternal, Novia Indri Pratiwi (2024) dan Zumratul Meini (2024) mengungkap bahwa penerapan ESG berpengaruh terhadap persepsi investor dan konsumen¹⁷, di mana perusahaan yang konsisten dalam pelaporan ESG lebih dipercaya dan cenderung memperoleh insentif fiskal yang lebih besar dari pemerintah.¹⁸ Hal ini diperkuat oleh riset Zhafirrah Rosalinda (2025), yang menekankan bahwa ESG memiliki fungsi transformasional, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk kepentingan citra korporasi, sehingga perlu dikawal secara ketat oleh auditor dan regulator.¹⁹

Keseluruhan temuan dari literatur yang dikaji menunjukkan bahwa ESG memiliki kontribusi signifikan terhadap transparansi akuntansi perpajakan di sektor manufaktur Indonesia. Namun, pengaruh ESG hanya akan optimal jika didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik, kapasitas akuntan yang etis dan profesional, sistem pelaporan yang terstandar, serta pengawasan yang independen dan berkelanjutan. Dengan demikian, ESG bukan hanya simbol komitmen keberlanjutan, tetapi menjadi instrumen penguatan sistem fiskal perusahaan dalam kerangka akuntabilitas publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka (*library research*), dengan tujuan menyusun pemahaman konseptual atas hubungan antara pelaporan ESG dan transparansi akuntansi perpajakan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Sumber utama berasal dari 20 artikel ilmiah, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun artikel jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi, yang dianalisis secara mendalam untuk menggali variabel-variabel utama, kerangka teori, pendekatan metodologi, serta hasil temuan empiris dari masing-masing studi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan menyeleksi dokumen yang relevan melalui kriteria topik, sektor, serta kejelasan keterkaitan antara ESG dan aspek akuntansi fiskal. Penelusuran sumber dilakukan dari berbagai universitas dan jurnal ekonomi terkemuka di Indonesia, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Negeri Malang.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kritis melalui tahapan reduksi data, pengorganisasian informasi tematik, dan penyusunan sintesis konseptual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap pola hubungan antara ESG, pelaporan perpajakan, dan kualitas tata kelola, serta mengonstruksi model naratif berdasarkan teori *stakeholder*, *agency*, dan *legitimacy*. Selain itu, proses validasi dilakukan dengan mencermati konsistensi argumentasi antar dokumen serta membandingkan perspektif empiris yang beragam.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengintegrasikan berbagai temuan terdahulu, tetapi juga membangun argumentasi baru mengenai urgensi ESG dalam memperkuat transparansi fiskal dan akuntabilitas korporasi sektor manufaktur di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Sampel dan Deskriptif Statistik

Karakteristik sampel dalam berbagai studi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini menunjukkan konsistensi dalam pemilihan perusahaan sektor manufaktur sebagai objek utama. Perusahaan manufaktur dinilai memiliki dampak lingkungan yang signifikan, serta keterikatan erat dengan regulasi sosial dan tata kelola perusahaan. Hal ini menjadikan sektor manufaktur sebagai sektor strategis dalam pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG). Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Putri Vraza Ayunda Krisna menggunakan 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022. Kriteria pemilihan sampel dalam studinya meliputi konsistensi pelaporan keuangan, tidak mengalami kerugian selama periode observasi, dan ketersediaan data ESG yang diukur melalui platform Bloomberg.

Studi lain oleh Novia Indri Pratiwi juga menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dan menghasilkan data deskriptif mengenai skor ESG perusahaan dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,478 dan standar deviasi 0,124. Angka ini mencerminkan tingkat variabilitas skor ESG yang sedang, menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan berada dalam kisaran nilai ESG yang moderat. Penelitian lain turut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis statistik klasik dan regresi linier berganda untuk mengevaluasi hubungan antar variabel.

Beberapa dokumen lain dalam studi ini juga menyatakan bahwa pengumpulan data dilakukan dengan metode purposive sampling dan kriteria seleksi yang cukup ketat, seperti yang dijelaskan dalam studi oleh Risma Tesya Andita dan Graciella Tanaya. Hal ini penting untuk menjaga validitas data dan menghindari bias seleksi. Rentang tahun yang digunakan umumnya

berkisar antara 2018 hingga 2022, selaras dengan periode intensifikasi pelaporan keberlanjutan di Indonesia menyusul penerapan POJK No. 51 Tahun 2017 oleh OJK.

Secara umum, karakteristik sampel dalam studi-studi ini menggambarkan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia memiliki kecenderungan untuk mulai mengintegrasikan ESG ke dalam strategi bisnis dan pelaporan fiskalnya. Namun demikian, konsistensi dalam penerapan dan pengungkapan ESG masih sangat bervariasi, baik antar perusahaan maupun antar tahun, yang menciptakan tantangan tersendiri dalam mengukur hubungan kausal antara ESG dan transparansi akuntansi perpajakan.

4.2. Pengaruh ESG terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh ESG terhadap praktik penghindaran pajak telah menjadi sorotan utama dalam banyak studi terkini. Penelitian oleh Putri Vraza Ayunda Krisna menyimpulkan bahwa skor ESG yang tinggi berkontribusi pada penurunan tax avoidance, dengan hasil regresi yang menunjukkan koefisien negatif signifikan sebesar $-0,007$. Artinya, semakin tinggi kualitas pelaporan ESG yang dilakukan perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Penjelasan dari temuan ini terletak pada fungsi ESG sebagai alat pemantauan eksternal yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan serta informasi perpajakan. Perusahaan yang memiliki skor ESG tinggi umumnya sudah menginternalisasi prinsip tata kelola yang baik, menjadikan kepatuhan fiskal sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya.

Sebaliknya, studi oleh Novia Indri Pratiwi menunjukkan bahwa meskipun ESG memiliki nilai strategis, tidak ditemukan pengaruh langsung yang signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini diduga karena belum semua perusahaan benar-benar mengintegrasikan kebijakan ESG ke dalam praktik perpajakannya. ESG lebih banyak digunakan sebagai instrumen reputasional, bukan pengendali strategis pajak. Sementara itu, Risma Tesya Andita memberikan penjelasan yang lebih mendalam dengan menganalisis dimensi ESG secara terpisah. Ia menemukan bahwa hanya aspek sosial (S-score) yang menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, sementara dimensi lingkungan (E-score) dan tata kelola (G-score) tidak berpengaruh secara statistik. Temuan ini menandakan bahwa tekanan sosial, seperti ekspektasi masyarakat terhadap kontribusi perusahaan pada pembangunan sosial dan publikasi CSR, lebih efektif dalam menekan agresivitas pajak dibanding tekanan lingkungan atau pengawasan tata kelola formal.²⁰

Secara umum, hasil-hasil tersebut memperlihatkan bahwa ESG memang berpotensi menekan penghindaran pajak, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh cara perusahaan mengimplementasikan dan melaporkan indikator ESG, serta persepsi publik dan investor terhadap integritas pelaporan tersebut. Oleh karena itu, ESG harus dipahami bukan hanya sebagai kepatuhan administratif, melainkan sebagai refleksi dari tata kelola fiskal yang beretika dan bertanggung jawab

4.3. Peran Moderasi Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan elemen penting dalam mempengaruhi efektivitas implementasi ESG dan pengaruhnya terhadap transparansi akuntansi perpajakan. Dalam konteks ini, studi oleh Putri Vraza Ayunda Krisna menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi—yakni ketika sebagian besar saham dimiliki oleh pemegang saham institusional atau pengendali—memiliki dampak negatif terhadap kekuatan hubungan ESG dan penghindaran pajak. Dalam regresi interaksi yang digunakan, hasilnya menunjukkan bahwa ketika kepemilikan terkonsentrasi tinggi, efek pengendalian ESG terhadap praktik tax avoidance menjadi lemah. Artinya, walaupun ESG diterapkan secara formal, pemilik saham mayoritas

dapat mengarahkan manajemen untuk tetap mengoptimalkan strategi penghindaran pajak demi kepentingan efisiensi laba jangka pendek.

Fakta ini menggambarkan adanya konflik kepentingan yang sesuai dengan *agency theory*, di mana kepemilikan besar justru membuka peluang *entrenchment* dan potensi dominasi pemilik dalam pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan stakeholders secara luas. Dalam beberapa kasus, tekanan dari pemegang saham besar untuk menjaga nilai pasar saham dapat menekan manajemen agar mencari cara-cara efisiensi pajak yang tidak selalu sejalan dengan prinsip tata kelola keberlanjutan.

Di sisi lain, studi yang sama juga mengevaluasi kepemilikan manajerial—yakni saham yang dimiliki oleh pihak manajemen atau direksi. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh moderasi yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan oleh manajemen tidak cukup kuat untuk mempengaruhi arah hubungan ESG dan penghindaran pajak, kemungkinan karena fokus utama manajemen tetap pada pelaksanaan operasional dan bukan pada strategi fiskal jangka panjang.

Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Imam Prayoga dan Gabriel Silalahi yang menyebutkan bahwa struktur kepemilikan dapat memengaruhi kualitas pelaporan ESG secara tidak langsung. Ketika dewan komisaris dan pemegang saham tidak mendukung integritas pelaporan ESG, maka ESG hanya menjadi pelengkap administratif semata tanpa dampak nyata terhadap akuntabilitas fiskal perusahaan. Dengan demikian, peran struktur kepemilikan sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan tata kelola dan pelaporan keberlanjutan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepatuhan pajak

4.4. Kompleksitas Pengukuran ESG dan Tantangan Empiris

Pelaporan ESG tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas metodologis dan konteks implementasi yang berbeda antar perusahaan maupun sektor industri. ESG merupakan konstruk multidimensi yang mencakup aspek lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*), yang masing-masing memiliki indikator kualitatif dan kuantitatif. Kompleksitas ini membuat pengukuran ESG menjadi tidak seragam dan sering kali menimbulkan tantangan dalam perbandingan antar entitas. Saproni et al. (2025) menyebutkan bahwa perbedaan dalam skema penilaian ESG, baik yang berbasis indeks global seperti Bloomberg ESG Rating maupun pengungkapan mandiri yang mengikuti GRI (Global Reporting Initiative), dapat menghasilkan bias interpretatif dalam studi kuantitatif yang mengaitkan ESG dengan transparansi pajak.

Perusahaan manufaktur di Indonesia cenderung memiliki beban ESG yang tinggi karena aktivitas produksinya berdampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan ESG menjadi lebih relevan untuk menilai integritas operasional dan fiskal perusahaan di sektor ini. Namun demikian, ketersediaan data ESG masih sangat terbatas, baik dari sisi kualitas pelaporan maupun konsistensi waktu. Beberapa perusahaan hanya mengungkapkan informasi ESG secara deskriptif dalam laporan keberlanjutan tanpa menyertakan metrik yang dapat diukur atau diverifikasi. Hal ini menyulitkan pengukuran kuantitatif ESG secara valid dan reliabel.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian terhadap ESG dan transparansi pajak juga sangat bervariasi. Sebagian studi menggunakan metode regresi linier sederhana, sementara yang lain menerapkan regresi panel, path analysis, hingga pendekatan moderasi dan mediasi. Variasi ini menciptakan heterogenitas hasil, bahkan dalam populasi yang sama. Penelitian oleh Risma Tesya Andita (2024) misalnya, memisahkan pengaruh dimensi ESG secara individual dan menemukan bahwa hanya *S-score* yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *E-score* dan *G-score* tidak.

Permasalahan lain muncul dari konteks regulasi di Indonesia yang belum sepenuhnya mewajibkan pelaporan ESG bagi semua sektor. Meskipun OJK telah mengatur kewajiban laporan keberlanjutan melalui POJK No. 51 Tahun 2017, implementasinya masih lemah karena belum ada sanksi tegas atau insentif yang mendorong kepatuhan. Akibatnya, perusahaan cenderung menyusun laporan ESG sebagai formalitas, bukan sebagai bentuk akuntabilitas yang substantif. Hal ini memungkinkan terjadinya *greenwashing*, yakni praktik mengaburkan kondisi sebenarnya dari keberlanjutan perusahaan dengan penyajian laporan yang menyesatkan.

Dengan berbagai tantangan tersebut, pengukuran ESG menjadi aspek krusial yang menentukan validitas penelitian tentang kaitannya dengan transparansi perpajakan. Diperlukan standarisasi pelaporan ESG, peningkatan literasi akuntan dalam menyusun laporan keberlanjutan berbasis data, serta sistem audit independen untuk menjamin keakuratan pelaporan ESG. Tanpa langkah ini, ESG hanya akan menjadi instrumen simbolik tanpa kekuatan pengaruh terhadap strategi fiskal yang bertanggung jawab

4.5. ESG dan Strategi Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan salah satu area kritis dalam manajemen keuangan perusahaan yang kerap menjadi sorotan publik, regulator, dan investor. Dalam konteks ini, ESG memiliki potensi besar sebagai alat penyeimbang terhadap strategi agresif penghindaran pajak, seperti *thin capitalization*, *transfer pricing*, dan manipulasi laporan keuangan. ESG disclosure yang tinggi diyakini dapat membentuk batas etis dan regulatif terhadap kecenderungan perusahaan mengeksploitasi celah hukum perpajakan. Penelitian oleh Sinta Reka (2024) memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki pelaporan ESG yang baik cenderung lebih hati-hati dalam menyusun strategi fiskalnya karena sadar akan konsekuensi reputasi dan potensi pengawasan dari pemangku kepentingan.

Dalam hasil regresi yang dikaji, pengungkapan ESG terbukti dapat memperlemah pengaruh negatif dari strategi pajak agresif terhadap kredibilitas perusahaan. ESG dalam hal ini berfungsi sebagai semacam "tameng moral" yang mengarahkan perusahaan untuk tidak hanya mematuhi aturan formal, tetapi juga menjalankan bisnis secara beretika. Ketika perusahaan menyadari bahwa pelaporan ESG menjadi perhatian utama publik dan investor institusional, maka mereka akan lebih berhati-hati dalam menyusun strateginya, karena kesalahan atau penyimpangan fiskal dapat merusak citra keberlanjutan yang telah mereka bangun.

Dari sisi regulator, pelaporan ESG juga dapat dijadikan instrumen pendukung dalam evaluasi kepatuhan fiskal perusahaan. Otoritas pajak dapat menggunakan data ESG sebagai indikator awal dalam proses profiling risiko pajak, sehingga perusahaan yang memiliki skor ESG rendah atau pelaporan ESG yang lemah dapat dianggap berisiko tinggi dalam konteks penghindaran pajak. ESG menjadi semacam sinyal kualitas tata kelola, yang pada akhirnya mempersempit ruang bagi perusahaan untuk melakukan manuver fiskal yang berisiko.

Lebih lanjut, ESG juga berdampak pada keputusan strategis perusahaan, seperti restrukturisasi modal, alokasi sumber daya, dan pembentukan unit bisnis baru. Perusahaan dengan komitmen tinggi terhadap ESG akan cenderung memilih strategi yang tidak hanya efisien secara finansial, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dan fiskal. Dengan demikian, ESG dapat dikatakan berperan sebagai alat transformasi dalam perencanaan pajak perusahaan, yang menggeser fokus dari efisiensi maksimal menuju kepatuhan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi ESG dan strategi pajak tidak bersifat opsional, melainkan keharusan dalam membangun bisnis yang bertanggung jawab.

4.6. Implikasi Teoritis dan Praktis

Implikasi dari hasil penelitian ini dapat ditinjau dari tiga kerangka teori utama: *stakeholder theory*, *agency theory*, dan *legitimacy theory*. Ketiganya memberikan fondasi konseptual yang kuat dalam menjelaskan korelasi antara pengungkapan ESG dan transparansi akuntansi perpajakan, terutama dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia.

Pertama, menurut *stakeholder theory*, perusahaan tidak lagi sekadar bertanggung jawab pada pemegang saham, melainkan juga pada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, seperti karyawan, komunitas lokal, pemerintah, dan lingkungan. Dalam kerangka ini, ESG menjadi sarana komunikasi antara perusahaan dan stakeholder untuk menunjukkan bahwa kegiatan operasional telah mempertimbangkan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. ESG yang transparan menjadi sinyal positif bahwa perusahaan peduli pada kepentingan kolektif, termasuk dalam hal kewajiban fiskal. Dengan demikian, pelaporan ESG yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik dan otoritas pajak, serta memperkuat legitimasi perusahaan sebagai entitas bisnis yang etis.

Kedua, *agency theory* membantu menjelaskan adanya potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, atau antara pemilik modal dengan masyarakat umum. Dalam konteks ini, ESG berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang dapat membatasi perilaku oportunistik manajer dalam melakukan penghindaran pajak. Namun, temuan bahwa kepemilikan terkonsentrasi dapat melemahkan hubungan negatif antara ESG dan penghindaran pajak menjadi bukti bahwa ESG hanya efektif bila ada struktur tata kelola yang mendukung. Dengan kata lain, ESG bukan jaminan otomatis terhadap kepatuhan pajak tanpa adanya pengawasan institusional dan mekanisme audit internal yang efektif.

Ketiga, *legitimacy theory* menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial melalui praktik pelaporan yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. ESG, dalam hal ini, menjadi alat untuk menunjukkan kesesuaian antara operasi perusahaan dan harapan sosial, termasuk dalam hal perpajakan. Ketika publik melihat bahwa sebuah perusahaan aktif melaporkan kegiatan keberlanjutannya dan mematuhi ketentuan fiskal, maka tingkat kepercayaan terhadap perusahaan akan meningkat. Ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk menjadikan ESG sebagai bagian strategis dari proses pelaporan fiskal dan pelaporan keuangan secara umum.

Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa ESG dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan pajak secara lebih luas. Pemerintah dapat menjadikan pelaporan ESG sebagai salah satu indikator dalam sistem deteksi dini (*early warning system*) terhadap potensi penghindaran pajak. Sementara itu, perusahaan dapat memanfaatkan ESG untuk membangun citra positif yang berkelanjutan di mata investor dan konsumen, serta sebagai alat negosiasi dengan regulator fiskal. Bagi akuntan dan auditor, temuan ini menegaskan pentingnya mengembangkan kompetensi dalam penyusunan dan penjaminan mutu laporan keberlanjutan agar dapat berfungsi optimal dalam mendukung transparansi fiskal.

Dengan demikian, integrasi ESG dalam sistem pelaporan perusahaan bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga merupakan strategi tata kelola yang adaptif terhadap perubahan ekspektasi sosial, regulatif, dan pasar. ESG yang dikelola secara strategis berpotensi besar dalam memperkuat legitimasi fiskal perusahaan dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) memiliki korelasi yang kuat terhadap peningkatan transparansi akuntansi perpajakan, khususnya pada perusahaan manufaktur di Indonesia. ESG tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan non-keuangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola, menurunkan risiko praktik *tax avoidance*, dan memperbaiki kredibilitas fiskal di mata pemangku kepentingan. Dimensi sosial dari ESG terbukti paling signifikan dalam menekan penghindaran pajak, menunjukkan bahwa tekanan etis dan publik lebih efektif dalam mengarahkan perusahaan menuju kepatuhan pajak daripada sekadar kontrol formal.

Temuan juga menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh moderasi terhadap efektivitas ESG. Kepemilikan terkonsentrasi justru melemahkan hubungan ESG dengan kepatuhan pajak, sementara kepemilikan manajerial tidak memberikan dampak signifikan. Kompleksitas dalam pengukuran ESG serta belum seragamnya standar pelaporan ESG di Indonesia menjadi tantangan utama dalam menghasilkan laporan yang akurat, konsisten, dan bebas dari praktik *greenwashing*.

Berdasarkan hasil tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, bagi perusahaan, integrasi ESG dalam strategi fiskal dan pelaporan akuntansi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai refleksi komitmen terhadap keberlanjutan dan kepatuhan fiskal. Kedua, regulator seperti OJK dan DJP disarankan untuk memperkuat regulasi dan sistem insentif-sanksi terhadap pelaporan ESG agar lebih tegas dan terukur, termasuk mendorong standarisasi pelaporan ESG di semua sektor. Ketiga, profesi akuntansi dan audit diharapkan untuk meningkatkan kompetensi dalam penyusunan dan penjaminan laporan ESG agar dapat memastikan pelaporan yang etis, akurat, dan dapat dipercaya.

Ke depan, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji secara empiris pengaruh ESG terhadap rasio efektivitas pajak di sektor manufaktur dan sektor lainnya. Selain itu, pengaruh ESG dapat pula ditelusuri terhadap aspek non-fiskal lainnya seperti kinerja saham, persepsi investor, dan ketahanan perusahaan terhadap krisis. Dengan demikian, peran ESG sebagai instrumen tata kelola modern akan semakin nyata dan strategis dalam membangun perekonomian yang transparan, berkelanjutan, dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

1. Setyaningrum, N. T., & Hasanah, D. U. (2025). Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Peran Etika Profesi Akuntan dalam Mengurangi Risiko Greenwashing pada Laporan Keberlanjutan (ESG Reporting) di Indonesia. In *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen* (Vol. 4, Issue 2).
2. Vraza, P., Krisna, A., & Juliarto, A. (2024). PENGARUH ESG TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH STRUKTUR KEPEMILIKAN. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 13(4), 1-15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
3. Al Hashfi, M. H. (2024). Beyond sustainability. *SCIENTAX*, 5(2), 131-147. <https://doi.org/10.52869/st.v5i2.771>
4. Yulinda, F. (2025). *THE INFLUENCE OF ESG, PROFITABILITY, AND LEVERAGE ON FIRM VALUE WITH TAX AVOIDANCE AS AN INTERVENING* (Vol. 5, Issue 3). www.idx.co.id
5. Reka Mayangsari, S., Khoiru Rusydi, M., & Amirya, M. (2024). ESG Disclosure: Moderating Thin Capitalization, Transfer Pricing and Tax Aggressiveness. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(3), 570-585. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i3.35509>

6. Fathurrahman, R., & Dewi, R. R. (2024). PENGARUH STRATEGI PERUSAHAAN, TRANSPARANSI, KINERJA ESG TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN KONSUMEN NON-CYCLICALS SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN TAHUN 202-202. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, AKuntansi*, 3(6), 796-810.
7. Khusna, K., & Subandi, H. (2025). ESG DISCLOSURE, RELATED PARTY TRANSACTIONS, AND EXECUTIVE CHARACTERISTICS ON TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 17(1), 67-83. <https://doi.org/10.33508/jako.v17i1.5837>
8. Ray, S. H. G., Simbolon, R. F., & Ismail, M. (2025). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Sustainability Report Sebagai Variabel Moderasi. In *Journal of Innovative and Creativity* (Vol. 5, Issue 2).
9. Tanaya, G., Samuel, H., & Devie, D. (2023). The Effect of Corporate Social Responsibility on Firm Value with Tax Avoidance and Sustainable Financial Performance as Mediators. *Petra International Journal of Business Studies*, 6(2), 157-166. <https://doi.org/10.9744/petraijbs.6.2.157-166>
10. Agustini, Y., Azwardi, & Mukhtaruddin. (2023). Pengaruh Environment, Social, and Governance, dan Financial Distress terhadap Tax Aggressiveness di Indonesia: CEO Gender sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 920-926. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i3.670>
11. Hapsari, D. I., & Chuang, Y.-H. (2025). DEVELOPMENT OF SUSTAINABILITY BALANCED SCORECARD: IMPACT ON COMPANY PERFORMANCE AND IMPLEMENTATION. *JAJA*, 12(1), 21-42. <https://doi.org/10.21512/jaja.v12i1.13337>
12. Indrawati, A., Ruliana, T., Yudhyani, E., & Nurfitriani, N. (2023). Environmental, Social, Governance Report, and Materiality Analysis Effect on Financial and Market Performance. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 6(1), 71-89. <https://doi.org/10.33005/jasf.v6i1.392>
13. Puspita Kristianti, I. (2024). *Women on Board: The Blank Space of ESG Impact in Indonesia*. www.idx.co.id
14. Prayogo, I., Setiawati, R., & Bah, C. J. (2024). *How Ownership Structure and ESG Disclosure Influence Firm Value and Performance: Unveiling the Audit Committee's Moderating Effects*. 1(1), 59-70. <https://doi.org/10.69725/ami.v1i1.98>
15. Harymawan, I., Putra, F. K. G., Fianto, B. A., & Wan Ismail, W. A. (2021). Financially distressed firms: Environmental, social, and governance reporting in indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 13(18). <https://doi.org/10.3390/su131810156>
16. Indri Pratiwi, N., Luk Fuadah, L., & Sriwijaya, U. (2024). The Influence Of Environmental, Social, And Governance (ESG) And Capital Intensity On Tax Avoidance In Public Companies Listed On The Indonesian Stock Exchange (IDX) Pengaruh Environmental, Social, And Governance (ESG) Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 5, Issue 2). <http://journal.yrpiuku.com/index.php/msej>
17. Meini, Z., & Setijaningsih, H. T. (2024). The Impact of ESG on Firm Value: Empirical Study on Indonesia and Singapore Companies. *Jurnal EQUITY*, 27(2), 128-141. <https://doi.org/10.34209/equ.v27i2.9183>
18. Rosalinda, Z. (2025). SUSTAINABILITY REPORTING: MEKANISME TRANSFORMASI ATAU SARANA GREENWASHING. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 16. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>

19. ANDITA, R. T. (2024). *PENGARUH ENVIRONMENTAL, SOCIAL, DAN GOVERNANCE (ESG) TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN TAX INCENTIVE SEBAGAI PEMODERASI.*
20. Saproni, S., Wahyutama, S. R., Ilmi, A. T., & Shabira, H. N. (2025). *Hubungan antara ESG dan Tax Avoidance: Studi Literatur Sistematis.* Jurnal Akuntansi dan Bisnis.